

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS ALQURAN SMPN 006 KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG

Ahmad Firdaus¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan daerah kota bontang nomor 10 tahun 2013 tentang pendidikan baca tulis alquran di smpn 006 kecamatan bontang selatan dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi peraturan daerah kota bontang nomor 10 tahun 2013 tentang pendidikan baca tulis alquran di smpn 006 kecamatan bontang selatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian inidilakukan dengan cara library research dan fieid work rearch yaitu observasi dan wawancara serta mempelajari dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Fokus penelitian ini adalah tenaga pengajar, pelaksanaan dan pengawasan, peran serta masyarakat. Dan faktor penghambat implementasi peraturan daerah kota bontang nomor 10 tahun 2013 tentang pendidikan baca tulis alquran di smpn 006 kecamatan bontang selatan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tenaga pengajar di smpn 006 tentang baca tulis alquran masih belum memiliki sertifikat wajib mengajar pendidikan baca tulis alquran. Pelaksanaan dan pengawasan di smpn 006 telah berjalan, namun hasil dari pelaksanaan dan pengawasan masih kurang optimal. Peran serta masyarakat di kelurahan bontang lestari terutama wali murid sangatlah penting, hal ini perlunya koordinasi antara dewan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat dalam mendukung kegiatan baca tulis alquran di smpn 006. Faktor penghambat meliputi kurangnya dana BOS dalam pelaksanaan baca tulis alquran, tenaga pengajar yang kurang kompeten di bidangnya, hasil dari bentuk pengawasan pemerintah daerah belum terlihat dan fasilitas pendukung kurang memadai.

Kata Kunci: *Implementasi, pendidikan, alquran.*

Pendahuluan

Berdasarkan obsrevasi di lapangan ada permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan proses belajar mengajar baca tulis alquran di SMPN 006, Yaitu kurangnya tenaga pengajar yang profesional manjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan baca tulis alquran. Serta minat dari siswa siswi itu sendiri masih tergolong rendah, dikarenakan banyaknya siswa yang tidak

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ahmadfirdaus.dd@gmail.com

memiliki kendaraan dan jarak sekolah dan tempat tinggal mereka sangatlah jauh, yang kebanyakan mereka berasal dari luar perbatasan daerah kota bontang, oleh karena itu siswa-siswi masih sedikit mengikuti pelajaran baca tulis alquran yang termasuk dalam pelajaran eksra kulikuler yang dilaksanakan setiap hari sabtu selama satu setengah jam selepas pulang sekolah, padahal dalam Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 10 tahun 2013 bab III bagian kedua pasal 8 ayat, di sebutkan bahwa “pelaksanaan kurikulum pendidikan baca tulis alquran pada santuan pendidikan paling sedikit 2 jam pelajaran setiap minggu di luar kurikulum wajib pendidikan agama dan budi pekerti.

Maka dari permasalahan di atas penulis mengaitkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang pendidikan Baca Tulis Alquran (BTA) pada Bab II pasal 2, 3, dan 4 yang berbunyi :

1. Pasal 2

Yang bermaksud, sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam rangka membangun dan membentuk manusia yang berakhlak mulia dan professional serta berwawasan Qurani.

2. Pasal 3

Tujuan Umum pendidikan baca tulis Alquran bagi Masyarakat Muslim, adalah:

- Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Alquran, serta penghayatan terhadap Alquran untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- Meningkatkan minat terhadap Alquran sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Alquran.

Tujuan Khusus Pendidikan baca tulis Alquran bagi Masyarakat Muslim, adalah :

- Mampu membaca, menulis, memahami dan melaksanakan ajaran Alquran dalam kehidupan sehari-hari.
- Sebagai upaya standarisasi sertifikasi/lisensi izin mengajar bagi para pengajar pendidikan Alquran.

3. Pasal 4

Sasaran pendidikan baca tulis Alquran adalah :

- Peserta didik yang beragama islam pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- Masyarakat muslim.

Pendidikan Baca Tulis Alquran bagi peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat yang religius. Mengingat pentingnya perda ini bagi perkembangan dan peningkatan Baca Tulis Alquran (BTA) bagi peserta didik, maka sangat penting disampaikan pada aparat dilingkungan pemerintahan dan masyarakat yang terkait langsung dengan pendidikan Baca Tulis Alquran.

Dan untuk penanggungjawab pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Alquran adalah Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sementara

pembinaan dan pengawasan Pendidikan Baca Tulis Alquran dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kantor wilayah kementerian Agama Provinsi dan kantor wilayah kementerian Agama Kabupaten/Kota. "Diharapkan peserta yang mengikuti sosialisasi dapat menyebarkan Perda Nomor 10 Tahun 2013 ini, pada kalangan masyarakat yang lebih luas sehingga perda ini betul-betul menjadi ketentuan yang mampu membentuk kehidupan yang lebih religius dan Islami.

Dan juga kita melihat pada dekade belakangan ini telah banyak metode pengajaran Baca Tulis Alquran (BTA) dikembangkan, begitu juga buku-buku panduannya telah banyak disusun dan dicetak. Para pengajar Baca Tulis Alquran (BTA) tinggal memilih metode yang sesuai dan efektif untuk dikembangkan, dan juga sesuai dengan tujuan pendidikan hal ini sebagaimana dalam rumusan tujuan pendidikan Nasional yang ditegaskan dalam Undang - Undang RI No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada BAB III pasal 4 yang dirumuskan sebagai berikut. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan dari pendidikan baca tulis alquran sebagai pendidikan agar lebih mengerti huruf dan kata atau kalimat dari ayat-ayat Alquran, sehingga diharapkan dalam perjalanan kehidupan umat muslim dapat menyusun dan menulis Alquran sesuai kemampuan oleh dirinya sendiri selama waktu hidupnya. Hal ini juga termaksud memahami makna yang terkandung tanpa ada keraguan-keraguan.

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membuktikan fenomena tentang permasalahan tersebut dengan melakukan sebuah penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Kota Bontang No. 10 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran implementasi Peraturan Daerah Kota Bontang No. 10 Tahun 2013 tentang pendidikan baca tulis alquran di SMPN 006 Kecamatan Bontang Selatan

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan

Menurut Frewit (dalam Wahab, 2012:109) mengatakan, "Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya pelaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya". Sedangkan kebijakan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama yang dipimpinya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya).

“Kebijakan atau policy penggunaannya sering disama artikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar” (Wahab, 2012:105). Sedangkan menurut Rianto (2002:110) “Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Dengan demikian pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

“Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu” (Suharto, dalam Rianto 2002: 136). Sedangkan menurut Knoepfel dkk (dalam Wahab, 2012:145) “Kebijakan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik”.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa setiap produk dari keputusan atau berbagai peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah merupakan suatu kebijakan publik yang berada di tengah kehidupan kita lewat tindakan pembuatan keputusan kebijakan publik itu berdampak langsung pada kehidupan individu, kelompok dan masyarakat.

Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2004:31) kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan : (1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. (2) Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. (3) Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Dan menurut Wilson (dalam Gunawan, 2003:31) mendefinisikan, “Kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)”.

Implementasi Kebijakan

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat.

Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi

Pendidikan

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. (Soekidjo Notoatmodjo. 2003 : 16). Definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002 : 263).

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1).

Baca Tulis Alquran

Membaca diartikan sebagai "melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya di hati, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis". (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 83).

Menurut Soedarso, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengarahkan sejumlah tindakan. Sedangkan Sofhah Sulistyowati mengatakan bahwa kegiatan membaca merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap pelajar, dimana dengan membaca secara teratur ia akan dapat menyerap gagasan, menambah wawasan, memunculkan ide-ide ataupun kreativitas baru. Menulis adalah usaha yang dilakukan oleh orang untuk membuat huruf (angka dan sebagainya) dengan pena (pensil, kapur, dan sebagainya). (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.1219).

Menurut Ali Ash Shabuniy, di Kitab At-Tibyan Fi Ulum al-Quran :

"Alquran adalah kalamullah sebagai mukjizat, diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul melalui perantara Jibril as., yang tertulis dalam mushhaf, yang dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawatir

(berkesinambungan), yang dinilai ibadah karena membacanya, yang diawali dengan Surat al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat an-Nas”.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam buku Sejarah dan Pengantar Ilmu alquran dan Tafsir mengatakan bahwa alquran adalah “Wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Muhammad saw. Yang telah disampaikan. (T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, hlm. 2-3).

Zakiah Daradjat, memberikan pengertian Alquran sebagai berikut: “Alquran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad.” Alquran merupakan kitab suci orang Islam yang harus dipelajari dan diamalkan isinya, serta sekurang-kurangnya umat Islam harus selalu membaca al-Qur’an. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Shaad ayat 29 sebagai berikut:

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran”. (QTS. Shaad : 29).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini lebih didasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian *survey* guna memperoleh data primer dan sekunder mengenai pengimplementasi Peraturan Daerah Kota Bontang No. 10 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran di SMPN 006 Kecamatan Bontang Selatan. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran serta masyarakat
 - a. Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program pendidikan baca tulis alquran.
2. Pelaksanaan dan Pengawasan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah dan masyarakat.
3. Tenaga Pengajar merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan baca tulis alquran.

Hasil Penelitian

Tenaga Pengajar

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pendidikan. Tenaga kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugasnya ia melaksanakan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Seperti halnya tenaga pendidik, tenaga kependidikan juga berkewajiban untuk membantu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Tenaga kependidikan dapat pula disebut sebagai tenaga penyelenggara pendidikan. Kepala sekolah dapat pula dimasukkan kedalam tenaga kependidikan, karena ia menyelenggarakan pendidikan dan menduduki jabatan struktural.

Profesional guru merupakan tujuan dari pembinaan ketenagaan untuk dapat menjawab segala tantangan dan perubahan sosial yang terjadi. Menurut Aqib (2009:03) mengatakan bahwa guru adalah sosok manusia yang harus digugu dan ditiru”. Predikat itu disandang dari pagi dia bangun tidur sampai malam saat dia masuk peraduan. Menurut Journal Education Leadership (dalam Aqib, 2009:02), “ada lima ukuran seorang guru itu dinyatakan profesional yaitu memiliki komitmen pada siswa dan proses belajar, secara mendalam menguasai bahan ajaran dan cara mengajarnya, bertanggungjawab memantau kemampuan belajar siswa melalui beberapa teknik evaluasi, seyogianya menjadi bagian darimasyarakat belajar lingkungan profesinya. Sedangkan Allerd (dalam Aqib, 2009:2-3), mengatakan bahwa selain kelima aspek itu, sifat kepribadian seorang guru yang amat penting artinya bagi proses pembelajaran adalah adaptabilitas, antusiasme, kepercayaan diri, ketelitian, empati dan kerjasama yang baik.

Kualitas seorang guru ditandai dengan tingkat kecerdasan, ketangkasan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi serta ikhlas dalam memajukan pendidikan mencerdaskan anak didik. Kualitas tenaga pengajar adalah bagian penting dari proses belajar mengajar yang merupakan tujuan dari suatu organisasi pendidikan. Kualitas seorang guru yang diberikan kepada anak didiknya yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kelulusan, baik dalam kualitas pribadi, moral, pengetahuan mampu kompetensi kerja. Guru harus berkualitas menurut standar tertentu. Bukti kualitas menurut standar tertentu yang menjamin seseorang dapat dikatakan sebagai guru profesional adalah selebar sertifikat.

Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi tau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu jabatan profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru sehingga pembelajaran sekolah juga akan berkualitas. Hal ini dengan ansumsi, peningkatan mutu guru akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalisme guru.

Pelaksanaan dan Pengawasan

Pelaksanaan dan pengawasan dalam pembelajaran baca tulis alquran di SMPN 006 Kota Bontang telah berjalan sesuai dengan baik. Perlu adanya tindakan atas hasil dari pengawasan tersebut agar dapat terus berjalan menjadi lebih baik. Dan terus di pantau perkembangannya oleh pihak dinas.

Pelaksanaan pembelajaran baca tulis alquran di SMPN 006 Kota Bontang. Proses pelaksanaan pembelajaran baca tulis Alquran yang diterapkan dalam satu kelas diberikan materi yang sama karena di dalam kelas pembelajaran secara homogen. Ruang Lingkup pembelajaran alquran tidak terlepas dari aspek membaca, menulis, memahami dan menghafalkan ayat alquran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran baca tulis quran disekolah akan memberikan banyak manfaat bagi siswa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan tersebut harus mampu meningkatkan pengayaan siswa baik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotor.
- b. Kegiatan tersebut guna membentuk manusia yang berakhlatul karimah.
- c. Memberikan kesempatan menyalurkan bakat dan minat siswa sehingga terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
- d. Adanya perencanaan dan persiapan serta pembiayaan yang telah diperhitungkan sehingga program dapat mencapai tujuannya.
- e. Koordinasi antara kepala sekolah dan guru, petugas BP dan orang tua murid.
- f. Pelaksanaan diikuti oleh semua atau sebagian siswa.

Istilah pembelajaran erat hubungannya dengan pengertian belajar dan mengajar. Karena belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi secara bersama – sama, belajar meliputi tidak hanya mata pelajaran tetapi juga penguasaan, kebiasaan, persepsi, kesenangan minat, penyusuaian sosial, bermacam – macam keterampilan dan cita – cita. Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku.

Secara sederhana, istilah pembelajaran (*intruction*) bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (*effort*) dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pembelajaran dapat pula dipandang sebagai kegiatan secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar

secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar, dengan demikian pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu kegiatan pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan pokok, yaitu : pertama, bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar. Kedua, bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar (Abdul Majid, 2012: 109-110).

Dari pengertian yang telah dipaparkan maka pembelajaran baca tulis Alquran merupakan suatu proses kegiatan penyampaian ilmu tentang alquran yang melibatkan siswa, guru, metode pembelajaran, dan juga materi membaca dan menulis alquran yang meliputi pengenalan huruf (makhroj), tanda baca (harakat) serta hukum bacaan (tajwid) dengan tujuan untuk memperoleh kemampuan untuk melisankan dan melambungkan huruf-huruf alquran.

Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam kegiatan baca tulis alquran di SMPN 006 di Kota Bontang, peran masyarakat menjadi salah satu kunci yang sangat penting dalam pelaksanaan baca tulis alquran dan juga menjadi tanggungjawab semua pihak dalam pengawasan, pelaksanaan dan keberlangsungan kebijakan tersebut.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2013 Bahwa :

1. Masyarakat berhak :
 - a) Mendirikan dan melaksanakan pendidikan baca tulis Alquran;
 - b) Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pendidikan baca tulis Alquran; dan
 - c) Mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program pendidikan baca tulis Alqur'an.
2. Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program pendidikan baca tulis Alquran.
3. Setiap orang tua muslim yang memiliki anak USIa 7 sampai dengan 18 tahun bertanggung jawab memberikan pendidikan baca tulis Alquran kepada anaknya.
4. Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Masyarakat merupakan sekelompok sosial terbesar dalam suatu negara. Selain didalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, pendidikan juga dapat berlangsung di dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan di dalam lingkungan masyarakat tentunya berbeda dengan pendidikan yang terjadi pada lingkungan keluarga sekolah. Peranan adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat, yang terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya, yaitu adanya kemauan, kemampuan masyarakat dan kesempatan.

Peran serta masyarakat merupakan keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya pendidikan yang juga merupakan tanggung jawab sendiri, keluarga dan masyarakatnya. Peran serta masyarakat ditinjau dari pemberdayaan masyarakat di SMPN 006 Kota Bontang meliputi melibatkan wali murid, komite dan masyarakat pada kegiatan sekolah sekolah serta masyarakat.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi baca tulis alquran di SMPN 006 Kota Bontang

Kurangnya Dana Khusus dalam pelaksanaan Baca Tulis Alquran

Dana pelaksanaan pendidikan baca tulis alquran di smpn 006 sementara masih menggunakan dana BOS sehingga terbatasnya pelaksanaan yang membutuhkan dana yang lebih. Biaya menurut Usri dan Hammer adalah sebagai *cost as axchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit*. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang. Dari beberapa pengertian biaya diatas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah sejumlah uang atau jasa yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk melaksanakan berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Tenaga Pengajar yang Kurang Kompeten di bidangnya

Seperti yang tercantum dalam undang-undang PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN pasal 13 bahwa:

Tenaga pengajar pendidikan baca tulis Alquran wajib memiliki sertifikat mengajar pendidikan baca tulis Alquran. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Sedangkan tenaga pengajar di SMPN 006 merupakan guru agama pendidikan agama islam yang belum memiliki sertifikat mengajar pendidikan baca tulis alquran.

Berbicara mengenai mendesain pembelajaran, tentunya merupakan bagian dalam kompetensi pedagogik, artinya seorang guru dikatakan kompeten, khususnya dalam hal kurikulum kompetensi jika menguasai seluruh pengetahuan yang telah diuraikan sebelumnya. Pendidikan di indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih demi mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun apabila lembaga pendidikan tersebut tidak diolah atau diatur

dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah jauh bahkan bisa jadi itu mustahil.

Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memegang sesuatu jabatan profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru sehingga pembelajaran sekolah juga akan berkualitas. Hal ini dengan asumsi, peningkatan mutu guru akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalisme guru.

Fasilitas Pendukung kurang Memadai

Hal ini sangat penting dalam menunjang proses baca tulis alquran, dapat dilihat dari dokumentasi peneliti bahwa siswa-siswi belajar tanpa menggunakan meja karena dari pihak sekolah tidak menyediakan meja hal ini dikarenakan minimnya dana dari pihak sekolah. Selain meja siswa-siswi juga kekurangan alat baca/buku pedoman.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, alat, media. Sarana pendidikan merupakan penunjang bagi proses belajar mengajar. Sarana pendidikan semua keperluan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar mencapai tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sedangkan pengertian prasarana secara etimologis (arti kata) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya : lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga, uang dan sebagainya. Sedangkan sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya : ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sarana pendidikan adalah semua keperluan yang secara langsung dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah keperluan yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju

sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Tenaga Pengajar merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan baca tulis alquran. Dan tenaga pengajar di SMPN 006 sudah cukup baik, dan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan baca tulis alquran No. 10 Tahun 2013, hanya saja dalam pelaksanaannya masih ada kendala seperti terbatasnya tenaga pengajar yang tidak memiliki sertifikat dan perlunya penambahan tenaga pengajar di SMPN 006 yang hanya memiliki 1 tenaga pengajar dengan 219 siswa – siswi beragama islam.
2. Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan pendidikan baca tulis Alquran pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang memiliki peserta didik beragama islam. Pelaksanaan dan pengawasan dalam pembelajaran baca tulis alquran di SMPN 006 Kota Bontang berjalan dengan baik. . Perlu adanya tindakan atas hasil dari pengawasan tersebut Dan diharapkan dapat terus berjalan menjadi lebih baik. Dan akan terus di pantau perkembangannya oleh pihak dinas.
3. Peran serta masyarakat ditinjau dari pemberdayaan masyarakat di SMPN 006 Kota Bontang meliputi melibatkan wali murid, komite dan masyarakat pada kegiatan sekolah-sekolah serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendidikan baca tulis alquran di SMPN 006 di Kota Bontang, kurang berperan aktif terutama orangtua wali murid yang kurang mengetahui tentang adanya pendidikan baca tulis alquran di SMPN 006.
4. Yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah kota bontang Nomor 10 Tahun 2013 tentang pendidikan baca tulis alquran di SMPN 006 kecamatan Bontang selatan ialah kurangnya dana khusus dalam pelaksanaan baca tulis alquran, tenaga pengajar yang tidak memiliki sertifikat dibidangnya dan fasilitas pendukung yang kurang memadai.

Saran

1. Dalam pelaksanaan dan pengawasan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah, dewan pendidikan dan peran serta masyarakat mengenai pendanaan dan kelengkapan pelaksanaan baca tulis alquran Hal ini dikarenakan kurangnya dana BOS dalam pelaksanaan baca tulis alquran. Sehingga diperlukannya dana khusus sebagai hasil dari bentuk pengawasan pemerintah daerah.
2. Dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di SMPN 006 Kota Bontang diperlukan tenaga pengajar yang profesional dan memiliki

sertifikat dalam pendidikan baca tulis alquran. Dan diharapkan dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pengajar terutama untuk guru pendidikan agama islam.

3. Dalam hal fasilitas seperti meja dan buku pedoman diperlukan adanya penambahan dana agar bisa melengkapi kebutuhan dalam pelaksanaan baca tulis alquran, sehingga dalam proses belajar mengajar berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Renika Cipta.
- Abdul, Majid. 2012. *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Rosda Karya.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Aqib, Zaenal, dkk. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru SD, SLB dan TK*. Bandung: Yrama Widya.
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Gunawan, Aditya, 2003. *Teori Data Penelitian Proses Kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rianto, Nugroho A. 2002. *Kebijakan Publik, Model Perumusan Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Bumi Akara
- Soekidjo Notoatmodjo. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- _____. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen - Dokumen:

- Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang pendidikan Baca Tulis Alquran (BTA)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.1219).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.83).
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1.